

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Hamid A. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. h. 359.
- Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 74-76. Lihat juga; Hassan Muarif Ambary, *Menemukan Jejak Arkeologis dan Historis Islam* (Jakarta: Logos, 1995).
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Armico, Bandung.
- , 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- , 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH.UII. Press, Yogyakarta.
- CST. Kansil, et. al., 2003, *Kemahiran Membuat Perundang Undang*, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Inu Kencana Syafii, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia(SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pegeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid 1)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- , 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

- M. Tahir Azhari, 2005, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, : Bulan Bintang, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, , Kanisius, Yogyakarta.
- , 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 2016, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta
- Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1985, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, 1993, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Iqbal, 2017, *Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rachmani Puspitadewi, 2007, *Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR-RI setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 25 No. 1.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Rudi Heriyanto, 2016, *Gagasan Pengujian Ketetapan MPR Dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. JOM Fakultas Hukum Vol. III.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta, Bandung.

Syatibi dalam Wael B. Hallaq, 2001, *Sejarah Teori Islam (Terjemahan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taufiqurrahman Syahuri, 2014. *Pengkajian Konstitusi tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Badan Pembinaan Hukum Negara, Jakarta.

Telly Sumbu, et.al, 2011, *Kamus umum politik & Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Totok Jumentoro, 2005, *Kamus Usul Fiqh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Yusri Mohamad, 2016, *Contemporary Ijtihad: An Analysis of Individual and Collective Approach*, Islamic and Strategic Studies Institute Berhad, Selangor, Malaysia.

#### **Jurnal / Internet :**

Cecep Supriadi, 2015, *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*, (Dalam Jurnal Kalimah Volume 13, No. 1 Maret).

Detiknews, TAP MPR Kembali Masuk Jadi Peraturan Perundang-undangan. <https://news.detik.com/berita/d-1687495/tap-mpr-kembali-masuk-jadi-peraturan-perundang-undangan>. Jumat 22 Juli 2011. Diakses tanggal 27 Juli 2021. Pukul 07.34 wib.

Dian Agung Wicaksono, 2013, *Implikasi re-eksistensi TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang adil di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol 10, tanggal 1 Maret.

Ika Y. Darmayanti, 2019, *Politik Hukum Pemilu Legislatif*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Edisi 2, Juni 2019.

Iwan Sulistiyo dan Sri Kusriyah, 2018, *Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret.

Jimly Asshiddiqie, e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.

Jumni Nelli, 2012, "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan," Jurnal Hukum dan HAM, Cet. Ke-1, Pekanbaru.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/uji>.

Kartono, 2011, "*Politik Hukum Judicial Review di Indonesia*", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 (Edisi Khusus Februari).

Muh. Alim. *Hukum Konstitusi dalam Pandangan Islam. Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bertajuk "Asas-Asas Hukum Modern dan Pengujian Peraturan Dalam Islam"* yang diselenggarakan di Kampus Terpadu UMY, Sabtu 20 Februari 2010. <https://www.omy.ac.id/hukum-konstitusi-dalam-pandangan-islam> diakses tanggal 28 Juli 2021.

Putiera Achmani, artikel, dari <http://putierachmani.blogspot.com/2014/02/artikel.html>, Diakses tanggal 30 Agustus 2021.

Rekapitulasi perkara pengujian Undang-Undang, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses 28 Juli 2021. Pukul 11.25 wib.

Sosialisasi ketetapan MPR oleh MPR-RI, <http://www.mpr.go.id/berita/read/2012/02/02/10228/bahan-materi-sosialisasi-4-pilar-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>. artikel di akses pada 30 Agustus 2021.

Sri Praptini dan Sri Kusriyah, 2019, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum . Volume 2 Edisi 1, Maret 2019.

Widayati, et al, 2014, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Media Hukum. Vol. 21 No. 2. Desember.

-----, 2016, *Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. III No. 1 Januari-April.

#### **Lain-Lain :**

Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002*, TAP MPR No. I/MPR/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dengan Pemohon Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam perkara Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hal. 25

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/MPRS/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013.

Risalah Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XI/2013.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

